

Research Article

Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung

Eddy Suharyanto¹, Acep Dani Ramdani², Ryan Yustian³,
Ipan Sopandi⁴, Yosol Iriantara⁵

¹Stikes RS Dustira, ²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ³STAI Pelabuhanratu,
⁴Pusat Pendidikan Zeni Bogor, ⁵ Universitas Islam Nusantara Bandung

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 18, 2022

Revised : March 8, 2023

Accepted : March 25, 2023

Available online : March 28, 2023

How to Cite: Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, and Yosol Iriantara. 2023. "Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):206-14. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.422.

*Corresponding Author: Email: eddy_yantou@yahoo.com (Eddy Suharyanto)

Improving the Quality of School Education Bureaucratic Services Avicenna Inclusive Organizer in Bandung Regency

Abstract. Bureaucracy can be understood as work procedures, organizational systems, and power to make decisions, currently the rules for implementing inclusive schools have been rolled out by requiring that every school accept children with special needs to be involved and participate in class with other students. This research aims to contribute to improving excellent service to children with special needs (ABK) in regular schools providing inclusive education. Schools are expected to provide equal opportunities for all children. The method used is descriptive method with a qualitative approach, carried out at the Ibnu Sina Elementary School and the Cendikia Leadership School, Bandung Regency. The findings obtained are that the implementation of inclusive education has not been carried out explicitly, either in the form of written programs or in educational services that are tailored to the needs of students. It is necessary to formulate a more qualified special education service program. The indications from the study results are that a service program development plan is needed that can address the problems of schools providing inclusive education in providing educational services to children with special needs. training programs for teachers in handling children with special needs in inclusive schools are urgently needed and have a positive impact on both the teachers themselves and for all students without exception. Therefore, an appropriate, continuous, tiered and consistent training program will increase the effectiveness of educational services for children with special needs in inclusive schools.

Keywords: Policy Bureaucracy, Education Services, Inclusive Education.

Abstrak. Birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan, saat ini aturan penyelenggaraan sekolah inklusif sudah digulirkan dengan mewajibkan setiap sekolah menerima anak berkebutuhan khusus terlibat dan ikut berpartisipasi di dalam kelas bersama peserta didik lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan prima pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah diharapkan memberikan kesempatan yang sama untuk semua anak. Metoda yang digunakan metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di sekolah Dasar Ibnu Sina dan Sekolah Cendikia Leadership Kabupaten Bandung. Temuan yang didapat bahwa implementasi pendidikan inklusif belum dilaksanakan secara eksplisit, baik berupa program tertulis maupun dalam pelayanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan siswa. Perlu dirumuskan program pelayanan pendidikan khusus yang lebih mumpuni. Indikasi hasil studi dibutuhkan sebuah rancangan pengembangan program layanan yang dapat menjawab masalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam memberikan layanan pendidikan pada ABK. program pelatihan untuk guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sangat diperlukan dan memberikan dampak yang positif untuk baik untuk gurunya itu sendiri maupun untuk semua siswa tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, program pelatihan yang tepat, berkesinambungan, berjenjang serta dilakukan secara konsisten akan meningkatkan efektivitas layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Kata Kunci: Birokrasi Kebijakan, Layanan Pendidikan, Pendidikan Inklusif.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal profesional dan berdaya saing tinggi. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi penting dalam pembangunan nilai-nilai dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Di samping itu, diyakini pula oleh berbagai bangsa bahwa pendidikan juga merupakan cara yang efektif sebagai proses nation and character building, yang sangat menentukan perjalanan dan regenerasi suatu negara. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan pendidikan mencakup berbagai dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multihak.

Pendidikan secara faktual merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi UNESCO tentang pendidikan untuk semua (education for all) pada tahun 2001. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Artinya pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Hal itu sesuai dengan apa yang telah digariskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2). Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan, dalam hal ini pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok pesantren, perguruan-perguruan, dan lain sebagainya.

Adanya paradigma pendidikan inklusif sesuai dengan hak-hak azasi manusia, hakekat paradigma pendidikan inklusif yaitu sistem layanan pendidikan yang

mengakomodasi keragaman peserta didik dimana setiap perbedaan dihargai dan diakomodasi. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Pendidikan yang menghargai perbedaan anak dan memberikan layanan kepada setiap anak, tidak terkecuali tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Inklusi adalah sebuah paradigma atau filosofi dimana anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya di sekolah reguler. Menurut Lynch (1994) tentang sekolah inklusif: Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individunya dapat terpenuhi.

Sedangkan Fitria mengatakan (2012) mengatakan ;Sekolah Inklusif (di Indonesia) adalah sekolah biasa (SB) pada umumnya yang mengakomodasi semua anak atau peserta didik baik anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus (cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, mental, cerdas, berbakat istimewa daerah terpencil/terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/bencana sosial/miskin) mempunyai perbedaan pangkat, warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok, politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), anak nomaden, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Beberapa sekolah di Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan program layanan pendidikan Inklusif di sekolah. Terselenggaranya sistem inklusi di sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan deklarasi Kabupaten Bandung yang Inklusif pada tanggal 5 Februari 2013. Program layanan pendidikan inklusif belum diterapkan secara menyeluruh di beberapa sekolah. Belum terakomodirnya dengan optimal program layanan pendidikan Inklusif khususnya bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Dengan kata lain bahwa program layanan pendidikan inklusif di Sekolah yang berdomisili di daerah Kabupaten Bandung diasumsikan tidak atau kurang sesuai dengan filosofi sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah berlangsung selama ini. Kondisi ini akan membingungkan, membuat resah baik bagi para praktisi, akademisi bahkan bagi para guru dan sumber daya yang terlibat di sana.

Birokrasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bila kenyataannya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai: (a) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan, dan (b) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba

lamban, serta menurut tataaturan yang banyak liku-likunya. Wikipedia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja.

Birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi (Thoha, 2012: 61). Pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Birokrasi terjadi dalam suatu organisasi (pemerintah), sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara jelas dikemukakan dalam PP No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi, Pasal 3 (1) dan Permendiknas No. 33 tahun 2008 Bab. II butir 1.d. dijelaskan bahwa Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. (DirDikLuarBiasa, 2004).

Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung yang berisi tentang bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru di Kab/Kota Bandung dan syarat-syaratnya, serta menjelaskan tentang ketentuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai sekolah yang mengakomodir keberagaman peserta didik, terbuka, adil, dan tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik hambatan disabilitas, hambatan sosial ekonomi, dan hambatan lainnya. Serta inovatif dan fleksibel mengoptimalkan potensi semua peserta didik.

Penelitian ini merupakan sejauhmana birokrasi dan kebijakan tentang standar pelayanan pendidikan inklusif di sekolah Ibnu Sina dengan mengacu kepada aturan pemerintah setempat yang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan di lapangan, yakni untuk mempelajari kondisi yang objektif program layanan pendidikan Inklusif yang efektif di dua sekolah dasar inklusi yang ada di Kab. Bandung. Hal ini dirasa penting, karena telah terjadi kesenjangan antara kondisi empiris dengan teoritis pelaksanaan layanan pendidikan khusus di sekolah-sekolah tersebut yang menyelenggarakan program layanan pendidikan inklusif terutama dalam hal menggali potensi peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan pelayanan pendidikan yang optimal. Oleh karena itu untuk membantu meminimalisir atau meniadakan kesenjangan tersebut, perlu diadakan penelitian yang berorientasi pada

pengembangan program layanan pendidikan Inklusif di sekolah Dasar yang berada lokasinya di wilayah Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, serta menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan di lapangan dengan memotret dan menyajikan data dengan apa adanya serta menginterpretasikan korelasi sebagai factor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung tentang peningkatan mutu layanan birokrasi pendidikan inklusif di sekolah Ibnu Sina Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Sementara studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan mutu layanan birokrasi pendidikan sekolah penyelenggara inklusif Ibnu Sina di Kabupaten Bandung adalah melalui program pelatihan untuk guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan khusus di Sekolah Dasar Ibnu Sina secara umum pada prinsipnya telah melaksanakan perencanaan yang berkaitan erat dengan indentifikasi kebutuhan antara lain: (a) tempat pelatihan, (b) Materi pelatihan, (c) jadwal pelatihan, (d) Media Pelatihan, (e) Metode Pelatihan, (f) Pemateri Pelatihan, (g) Peserta Pelatihan.

Materi pelatihan tidak hanya berupa materi yang bersifat teoritis mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan system pelayanan inklusi, indentifikasi psikologi anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkebutuhan khusus, penanganan anak berkebutuhan khusus, serta permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan pendidikan layanan khusus namun materi untuk penanganan, intervensi dan stimulasi yang melalui kegiatan simulasi secara langsung pun diajarkan. Materi-materi dasar itu sangat penting mengingat sebagian besar dari guru-guru yang terlibat di sekolah Ibnu Sina, sebagian besar adalah bukan lulusan Pendidikan Khusus dan beragam sfesifikasi jurusan dari keilmuan yang diambil dengan latar belakan S₁, D₃ dan SMU. Mengacu kepada lulusan pendidikan dan kebutuhan di lapangan perencanaan pemberian materi dianggap sangat penting dikarenakan mereka yang akan terlibat langsung di lapangan dan mereka harus tahu ilmu dan cara penanganannya, untuk meningkatkan kompetensi kemampuan guru sehingga akan berimbas pada kualitas mutu pendidikan inklusi dilembaganya.

Pengidentifikasian yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelatihan dengan cara menentukan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesesuaian materi pelatihan. Penentuan nara sumber di dua lembaga tersebut sudah sesuai dengan bidang kompetensi diantaranya mereka memiliki staf ahli ada psikolog dan

salah satu lembaga yaitu sekolah Ibnu Sina memiliki guru dengan berlatar belakang Pendidikan Khusus dan bidang keilmuan mereka sesuai kompetensi dan berhubungan dengan materi pelatihan di lapangan. Dengan demikian proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi program pelatihan guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan khusus telah dilakukan dengan baik dan terorganisasi cukup rapi.

Pengelolaan manajemen program pelatihan guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi melalui pendidikan khusus di sekolah Ibnu Sina dengan ruang lingkup kegiatan in house training dengan menunjuk dan melibatkan orang-orang sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diampunya dan dihadiri oleh tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsi dilembaganya. Menyusun jadwal kegiatan, penyiapan bahan dan alat pendukung kegiatan pelatihan disusun oleh masing-masing unit/divisi inklusi di tiap lembaga sebagai tim pelaksana teknis kegiatan pelatihan.

Dalam hal melakukan koordinasi setiap dengan tim inklusi dan unit-unit lainnya di sekolah Ibnu Sina, sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar, namun seperti : penyediaan bahan ajar yang terlambat, karena koordinasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan pelatihan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dukungan terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa koordinasi masih bersifat linier, belum menunjukkan etos kerja yang maksimal.

Proses pelaksanaan telah mengacu kepada struktur program pelatihan. Informasi yang terdapat dalam struktur program pelatihan diantaranya rincian proses kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir. Alokasi waktu setiap sesi pelatihan, tugas-tugas yang dipegang oleh pemangku kegiatan dalam kegiatan pelatihan, fasilitator/narasumber yang memberikan materi, panitia dan sie evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Tahap-tahap proses pelaksanaan yang diawali dengan pembukaan, review evaluasi dilapangan dan materi yang sebelumnya disampaikan, materi pokok dimana merupakan materi inti dalam kegiatan pelatihan, presensi kehadiran, dilanjutkan dengan Uji Kompetensi Guru bagi peserta melalui sesi Tanya jawab atau diskusi serta penutup.

Evaluasi pelatihan merupakan tahap akhir dalam manajemen program pelatihan yang dilakukan oleh peserta dengan mengisi lembar kuesioner, dan selanjutnya didata sehingga menghasilkan nilai dalam bentuk evaluasi performace appraisal guru peserta pelatihan. Evaluasi pelatihan terdiri dari : 1) pemberian motivasi kepada peserta, 2) Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peserta, 3) penguasaan nara sumber terhadap materi yang disampaikan, 4) pengelolaan narasumber pada penguasaan kelas, 5) penyajian materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak, 6) sikap profesionalisme narasumber terhadap peserta, 7) kerapian penyajian pelatihan , 8) metode penyajian narasumber, 9) gaya, sikap, perilaku dan bahasa yang mudah dipahami, 10) mampu menumbuhkan kebiasaan dan sikap positif (nurturant Effect), 11) pelayanan tim terhadap peserta, 12) mampu membuat lebih percaya diri, dan 13) mampu menggali potensi peserta, 14) Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi pesertadidik untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya, 15) pemanfaatan sumber belajar /media dalam pembelajaran, 16) pelibatan peserta didik dalam pembelajaran, 17) penggunaan bahasa yang benar dan tepat pada saat pembelajaran, 18) memberikan

umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Hasil lapangan tersebut di atas mengandung implikasi bahwa program pelatihan guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan sekolah inklusif sebagai salah satu bagian dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, sehingga dengan adanya program pelatihan untuk guru diharapkan dilapangan guru tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam menangani semua permasalahan siswa baik yang regular maupun yang berkebutuhan khusus, semua siswa ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhannya dengan pelayanan, sarana dan metode pendekatan yang ramah yang sangat penting mengacu kepada perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Ketika perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam manajemen program pelatihan guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sudah dilaksanakan, maka kita dapat mengharapkan program inklusi yang sudah digulirkan oleh pemerintah.

Pengorganisasian penyelenggaraan pembinaan pelatihan tampaknya belum maksimal karena bersifat in house training dan dijadikan program rutin dilembaga sekolah Ibnu Sina belum menunjukkan hasil yang maksimal terutama dalam penanganan anak dilapangan, untuk pelatihan dan pembinaan ini hanya untuk tim inklusi saja yang mendapatkan sedangkan untuk guru kelas dan lainnya tidak. Akibatnya berimbas pada pengabaian dan tanggung jawab hanya berfokus pada tim inklusi saja karena mereka kurang mendapatkan binaan ilmu penanganan anak dan keinklusan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas dan proses pembelajaran bermutu dibutuhkan guru yang kompeten, seorang guru harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan inovatif, yaitu dengan mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Guru merupakan sosok penting dalam proses belajar mengajar di kelas (sekolah). Dialah yang mempengaruhi peserta didik untuk berhasil mencapai kompetensi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus selalu belajar (meng-update) dan mengembangkan diri untuk dapat membantu peserta didik mencapai hasil terbaik dari setiap proses pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tuala (2018:40) bahwa: "Mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Dalam konsep ini hasil yang ingin dicapai adalah kepuasan peserta didik, sehingga mutu ditentukan sejauh mana guru mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan peserta didik bahkan melebihi. Karena kepuasan serta keinginan merupakan konsep yang abstrak, maka pengertian dimana hal ini disebut kualitas dalam persepsi-quality in perception".

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran PDBK di kelas, perlu adanya pengelolaan asesmen sebagai penunjang guru dalam pembuatan PPI serta sebagai standar keberhasilan pelayanan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Sallis (2012:29): "staff have to understand how they and their pupils and students will benefit from a change to a customer focus. Total quality is about more than being 'nice to customers and smiling'. It is about listening and entering into a dialogue about people's fears and aspirations."

Mutu terpadu bukan sekedar 'membuat pelanggan senang dan tersenyum'. Mutu terpadu adalah mendengarkan dan berdialog tentang kekhawatiran dan aspirasi

pelanggan. Dengan artian asesmen dapat dipandang sebagai upaya yang sistematis untuk mengetahui kemampuan, kelemahan, kesulitan dan kebutuhan PDBK pada bidang tertentu. Data hasil asesmen dapat dijadikan bahan dalam penyusunan pembelajaran secara individual serta penanganan. Sehubungan dengan itu, asesmen harus menjadi kompetensi bagi seluruh guru, khususnya guru yang menangani PDBK. Hal ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang mendukung kepentingan tersebut, salah satunya pemberian pelatihan dan workshop yang tepat.

Namun saat ini realita di lapangan beberapa pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun internal bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi, khususnya tentang bagaimana mengidentifikasi, mengasesmen serta penanganan PDBK tidak konsisten dilakukan, bahkan beberapa sekolah belum pernah mendapatkan materi tersebut. Terkadang pelatihan hanya berlangsung beberapa jam saja dan tidak ada kelanjutannya, materi hanya bersifat umum karakteristik dan tidak spesifik. Akibatnya para guru yang bukan lulusan pendidikan khusus merasa kurang percaya diri dalam menghadapi kasus-kasus PDBK yang harus ditanganinya di kelas.

KESIMPULAN

Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pelayanan Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Bandung, pelaksanaan pelatihan dan dalam menentukan jadwal pembekalan materi pelatihan, sumber, maupun fasilitator yang memberikan materi pembelajaran terhadap guru pendamping dan sisten anak berkebutuhan khusus di sekolah Ibnu Sina optimal, karna dijadikan jadwal rutin dilembaga sekolah. Evaluasi yang dilaksanakan sudah menggambarkan gambaran yang memuaskan untuk tim inklusi di Ibnu Sina, namun untuk tim lain masih belum optimal mengenai pembekalan pelatihan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolahnya masing masing dari mulai perencanaan dan pengorganisasian unit yang lain masih belum menjadwalkan, sehingga bermuara menjadikan kurang efektifnya penyelenggaraan pembinaan guru secara keseluruhan di sekolah Ibnu Sina tersebut yang pada gilirannya dapat menghambat terhadap kualitas hasil penyelenggaraab pembinaan di unit yang lain.

Berdasarkan Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik, terarah dan bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk kepada mereka yang berkebutuhan khusus atau masyarakat difabel yang memiliki perbedaan dalam kemampuan kecerdasan/mental, fisik, emosi ataupun lingkungan social tanpa membeda-bedakan, mereka harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.

Keberhasilan program pendidikan inklusif adalah dengan adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi akademik dan profesioanal dalam pendidikan khusus. Dalam arti guru-guru di sekolah inklusi harus memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam mengelola proses pembelajaran yang memungkinkan dapat memaksimalkan potensi setiap anak, anak dapat terlibat apapun kondisinya, dan kebutuhan khususnya terlayani. Dengan adanya Guru Pembimbing Khusus di sekolah. inklusi sangat membantu ABK dan tim guru lainnya dalam proses penanganan pembelajaran di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, Rona. (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus/JUPEKHU: Vol 1, No 1. Diakses 05 Oktober 2021.
- Lynch, James. (1994). Protection for Children with Special Need Education in Asian Region. USA: The World Bank
- Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, Unesco 2001.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
- Permendiknas No. 33 tahun 2008 tentang kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2009 No.70, Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Direktorat PLB 2004.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Sallis, Edward. (2012). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page. Ltd.
- Thoha, Miftah 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

P-ISSN : 2085-2487

E-ISSN : 2614-3275

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

Risalah

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Volume 9, No. 1, Maret 2023

Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia
www.faiunwir.ac.id